



Peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam Reformasi Hukum Investasi di Indonesia

M. Arif Florisadeg

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email : ariffiori@gmail.com

Abstract. *The Job Creation Law which was passed in 2020 is a milestone in investment law reform in Indonesia with the aim of improving the investment climate and increasing the ease of doing business in Indonesia. This journal discusses how the Job Creation Law plays a role in improving investment regulations, overcoming various obstacles faced by investors, and encouraging economic growth. Using a literature study and policy analysis approach, this journal examines the impact of the Job Creation Law on the investment sector in Indonesia, as well as the challenges still faced in its implementation.*

Keywords: *Job Creation Law, investment law reform, investment climate, ease of doing business, Indonesian economy.*

Abstrak. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 menjadi tonggak reformasi hukum investasi di Indonesia dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Jurnal ini membahas bagaimana UU Cipta Kerja berperan dalam memperbaiki regulasi investasi, mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan, jurnal ini mengkaji dampak UU Cipta Kerja terhadap sektor investasi di Indonesia, serta tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya.

Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, reformasi hukum investasi, iklim investasi, kemudahan berusaha, ekonomi Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya reformasi hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks investasi. UU Cipta Kerja diluncurkan dengan tujuan utama untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, meningkatkan kemudahan berusaha, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Reformasi hukum ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Sejak disahkannya UU Cipta Kerja, berbagai kalangan baik dari pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat luas menaruh perhatian besar terhadap dampak dari perubahan yang diperkenalkan oleh undang-undang ini.

Iklim investasi di Indonesia sebelumnya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti proses perizinan yang rumit, ketidakefisienan birokrasi, serta regulasi yang tumpang tindih. Proses perizinan usaha yang panjang dan sering kali memakan waktu telah menjadi salah satu tantangan utama bagi investor baik domestik maupun asing untuk memulai dan mengembangkan bisnis di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia dianggap kurang menarik di

mata investor, terutama ketika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang memiliki regulasi investasi yang lebih simpel dan pro-investasi. Oleh karena itu, dengan disahkannya UU Cipta Kerja, pemerintah berharap dapat menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi ketergantungan pada birokrasi yang tidak efisien. (Ras and Suroso 2020)

UU Cipta Kerja dirancang untuk memperbaiki iklim investasi dengan cara yang lebih terstruktur dan komprehensif. Undang-undang ini mencakup penyederhanaan proses perizinan, penghapusan ketentuan yang tumpang tindih, serta pengenalan berbagai insentif fiskal yang dirancang untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia. Salah satu perubahan utama yang diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja adalah sistem perizinan berbasis risiko, di mana izin usaha akan dibedakan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang dijalankan. Ini bertujuan untuk mempermudah proses perizinan bagi sektor-sektor dengan risiko rendah dan memperketat proses perizinan untuk sektor-sektor berisiko tinggi. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu izin usaha, meminimalkan biaya administratif, dan membuat iklim investasi di Indonesia menjadi lebih ramah dan transparan.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga memperkenalkan berbagai insentif fiskal untuk menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Insentif pajak, seperti pengurangan pajak penghasilan badan, fasilitas pengurangan pajak untuk investasi di daerah tertentu, dan insentif bagi sektor yang berorientasi ekspor, menjadi fokus utama dalam upaya mendorong investasi. Selain itu, UU ini juga mencakup pengaturan tentang pengurangan pajak bagi pengusaha yang berinvestasi dalam pengembangan teknologi hijau, serta pengaturan yang mempermudah pengambilan keuntungan (repatriasi) bagi investor asing. Dengan berbagai insentif ini, diharapkan akan ada peningkatan investasi langsung, baik yang masuk ke Indonesia maupun yang dilakukan oleh pengusaha domestik, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Namun, di balik berbagai upaya positif yang ada dalam UU Cipta Kerja, terdapat pula kekhawatiran dari berbagai pihak mengenai dampak negatif dari perubahan ini. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah potensi penurunan perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan hidup. Beberapa perubahan dalam UU ini dinilai dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi fleksibilitas pasar tenaga kerja, tetapi pada saat yang sama dapat mengorbankan hak-hak pekerja dalam bentuk kebijakan upah minimum yang lebih rendah atau pengurangan jaminan sosial. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang pengaruh dari UU ini terhadap perlindungan lingkungan, terutama terkait dengan penghapusan beberapa persyaratan

izin lingkungan yang dinilai dapat mempercepat proyek-proyek pembangunan namun berpotensi merusak ekosistem.(Arief and Ramadani 2021)

Tantangan lain dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja adalah bagaimana menjaga konsistensi dalam implementasi di tingkat daerah. Sering kali, peraturan investasi di tingkat pusat dan daerah tidak sinkron, yang mengakibatkan ketidakpastian bagi investor. Untuk memastikan UU ini efektif, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan dan menyediakan informasi yang jelas mengenai ketentuan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Penyuluhan dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat dan pelaku usaha juga penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat dan potensi dari UU Cipta Kerja.

Dalam jurnal ini, penulis akan mengkaji peran UU Cipta Kerja dalam reformasi hukum investasi di Indonesia, serta dampak dari perubahan yang diperkenalkan oleh undang-undang ini terhadap iklim investasi di Indonesia. Pendekatan studi literatur akan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan implementasi UU Cipta Kerja, serta untuk menganalisis kebijakan yang ada dan tantangan yang mungkin timbul. Penulis juga akan mengeksplorasi bagaimana UU ini mempengaruhi hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat, serta implikasi bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.(Kusbandini et al. 2023)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai metode utama. Sumber data meliputi Undang-Undang Cipta Kerja, literatur terkait hukum investasi, laporan pemerintah, dan hasil riset dari berbagai lembaga. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi dampak perubahan regulasi terhadap iklim investasi di Indonesia. Penelitian ini juga membandingkan UU Cipta Kerja dengan regulasi sebelumnya untuk melihat perbedaan dan peningkatan yang dihasilkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran dan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam reformasi hukum investasi di Indonesia. Undang-undang ini, yang disahkan pada tahun 2020, membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek regulasi yang mempengaruhi investasi di Indonesia. Melalui penyederhanaan proses perizinan, pengenalan insentif fiskal, dan penyesuaian dalam pengaturan pasar tenaga kerja, UU Cipta Kerja diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia dan meningkatkan daya saing

global. Berikut adalah pembahasan mengenai beberapa aspek utama dari UU Cipta Kerja dan implikasi dari perubahan tersebut. (Pardede 2023)

Penyederhanaan Proses Perizinan

Salah satu fokus utama dari UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan proses perizinan usaha di Indonesia. Sebelumnya, pengusaha harus melewati berbagai tahapan birokrasi yang panjang dan rumit untuk mendapatkan izin usaha, yang sering kali menghambat niat untuk berinvestasi di Indonesia. UU Cipta Kerja memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko, yang membedakan izin usaha berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang dijalankan. Pendekatan ini memungkinkan pengusaha untuk mendapatkan izin usaha yang lebih cepat dan dengan biaya yang lebih terjangkau, terutama untuk sektor-sektor dengan risiko rendah seperti perdagangan dan jasa.

Penyederhanaan ini dilakukan dengan pengenalan Sistem OSS (Online Single Submission), yang merupakan platform elektronik untuk mengurus perizinan. Sistem ini memungkinkan pengusaha untuk mengajukan izin usaha secara online, memantau status permohonan, serta mendapatkan izin dalam waktu yang lebih singkat. Dengan adanya OSS, diharapkan pengusaha dapat mengurangi waktu tunggu dan meminimalkan potensi korupsi yang sering terjadi dalam proses perizinan konvensional. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi OSS, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur teknologi dan pemahaman pelaku usaha tentang sistem ini. Diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar pengusaha bisa memanfaatkan OSS secara maksimal dan memahami prosedur yang berlaku.

Insentif Fiskal dan Pengurangan Pajak

UU Cipta Kerja juga membawa perubahan signifikan dalam sistem insentif fiskal di Indonesia. Pemerintah memperkenalkan berbagai insentif untuk menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu yang paling menarik adalah pengenalan fasilitas pengurangan pajak bagi pengusaha yang berinvestasi di sektor-sektor tertentu, seperti teknologi hijau, manufaktur, dan infrastruktur. Insentif ini mencakup pengurangan pajak penghasilan hingga 100% selama beberapa tahun untuk investasi di sektor-sektor prioritas. Selain itu, UU ini juga mengatur pengurangan tarif pajak penghasilan badan untuk sektor industri yang berorientasi ekspor.

Pengenalan insentif ini dimaksudkan untuk mendorong pengusaha domestik maupun investor asing untuk memperluas investasi mereka di Indonesia. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya insentif yang lebih baik, perusahaan akan lebih tertarik untuk mendirikan usaha di Indonesia, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat

perekonomian nasional. Namun, tantangan dalam penerapan insentif ini adalah memastikan bahwa insentif yang diberikan benar-benar efektif dalam mendorong investasi yang diharapkan, tanpa mengorbankan potensi pendapatan negara dari pajak. Penyelenggaraan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap dampak insentif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini mencapai tujuannya.(Rohendi 2023)

Dampak terhadap Perlindungan Hak Pekerja dan Lingkungan

Salah satu kekhawatiran utama dari berbagai kalangan terkait dengan UU Cipta Kerja adalah dampaknya terhadap perlindungan hak pekerja dan lingkungan. Beberapa perubahan dalam UU ini mengundang kritik dari serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil, yang mengkhawatirkan bahwa fleksibilitas pasar tenaga kerja yang diperkenalkan dapat mengurangi perlindungan hak-hak buruh. UU ini memberikan fleksibilitas dalam hal kontrak kerja dan jangka waktu kerja, yang dinilai dapat mengarah pada pengurangan jaminan sosial dan upah minimum.

Pemerintah menjelaskan bahwa fleksibilitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dengan membuat tenaga kerja lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Namun, kritik yang muncul mengarah pada potensi penurunan standar upah dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa perubahan dalam UU Cipta Kerja tidak mengarah pada eksploitasi pekerja atau penurunan perlindungan hak-hak buruh. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan undang-undang ini diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Dampak terhadap lingkungan juga menjadi perhatian utama. UU Cipta Kerja memperkenalkan perubahan dalam persyaratan izin lingkungan yang mempermudah proses perizinan untuk proyek-proyek tertentu dengan dampak lingkungan yang kecil. Namun, perubahan ini dikhawatirkan dapat menurunkan standar perlindungan lingkungan, terutama di sektor-sektor yang berpotensi merusak ekosistem, seperti pertambangan dan konstruksi. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa perubahan ini akan mempercepat proyek pembangunan dan investasi di Indonesia, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut tidak merusak lingkungan dan mematuhi standar internasional.(Asiva Noor Rachmayani 2021)

Implementasi di Tingkat Daerah dan Koordinasi Pemerintah

Salah satu tantangan besar dalam implementasi UU Cipta Kerja adalah bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaannya di seluruh wilayah Indonesia. UU ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan investasi, tetapi juga menuntut adanya koordinasi yang lebih baik agar tidak terjadi perbedaan penerapan yang dapat membingungkan investor. Banyak sektor usaha, terutama yang melibatkan sumber daya alam, masih memerlukan izin dari pemerintah daerah, yang sering kali tidak sejalan dengan kebijakan yang berlaku di tingkat pusat.

Pemerintah pusat perlu melakukan upaya yang lebih besar untuk menyosialisasikan dan memberikan pemahaman yang jelas tentang ketentuan yang berlaku dalam UU Cipta Kerja kepada pemerintah daerah. Sosialisasi yang efektif diharapkan dapat mengurangi potensi hambatan dalam pelaksanaan undang-undang ini di tingkat daerah dan memastikan bahwa semua pihak dapat mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, penguatan infrastruktur dan dukungan teknis bagi pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dalam menerapkan UU Cipta Kerja.

Implikasi bagi Ekonomi Nasional

Reformasi hukum investasi melalui UU Cipta Kerja juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi perekonomian nasional. Dengan adanya perbaikan dalam regulasi dan kemudahan berusaha, diharapkan akan ada peningkatan investasi yang masuk ke Indonesia, baik dalam bentuk FDI maupun investasi domestik. Peningkatan investasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha, pemerintah, dan masyarakat luas, untuk bekerja sama dalam menerapkan kebijakan yang tepat dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat dari reformasi ini.

Dalam jangka panjang, keberhasilan dari reformasi hukum investasi ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola dampak dari perubahan yang diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja, terutama dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan investasi dan perlindungan sosial. Pemerintah perlu memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari perubahan ini serta memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan

ekonomi dan sosial yang terus berubah.(Prasetyo, Abdul Rachmad Budiono, and Shinta Hadiyantina 2022)

Dampak Terhadap Kebijakan Regulasi di Sektor Strategis

UU Cipta Kerja juga mempengaruhi berbagai sektor strategis yang mempengaruhi ekonomi nasional. Dalam upaya untuk menarik investasi, UU ini melakukan penyederhanaan dan pengintegrasian berbagai peraturan yang mengatur sektor-sektor seperti pertambangan, energi, dan pariwisata. Misalnya, dalam sektor pertambangan, UU ini memperkenalkan mekanisme perizinan terpadu yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan izin dalam waktu lebih singkat dan dengan biaya yang lebih murah. Proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu hingga beberapa tahun kini dapat diselesaikan dalam beberapa bulan saja, dengan adanya Sistem OSS yang terintegrasi.

Hal serupa juga diterapkan pada sektor energi, di mana UU Cipta Kerja mempermudah pengembangan proyek-proyek energi terbarukan dengan memotong birokrasi yang selama ini menghambat investasi di sektor ini. Perubahan-perubahan ini diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan sumber daya energi terbarukan di Indonesia, yang selaras dengan komitmen global untuk mengurangi emisi karbon. Namun, perubahan ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa standar keselamatan dan perlindungan lingkungan tetap dijaga. Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan yang berinvestasi di sektor ini mematuhi regulasi lingkungan yang ketat untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan.

Selain itu, di sektor pariwisata, UU Cipta Kerja memperkenalkan insentif bagi investor yang ingin mengembangkan destinasi wisata baru di Indonesia. Insentif ini mencakup kemudahan perizinan, fasilitas fiskal, dan dukungan infrastruktur dari pemerintah. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan sektor pariwisata Indonesia bisa lebih cepat pulih setelah terdampak pandemi COVID-19 dan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Pemerintah juga memperkenalkan kebijakan bebas visa untuk beberapa negara tujuan pariwisata utama, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global.(Prasetyo et al. 2022)

Pengaturan dalam Sektor Tenaga Kerja

Salah satu perubahan yang paling banyak menuai kritik adalah terkait dengan sektor tenaga kerja. UU Cipta Kerja memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan hubungan kerja, termasuk dalam hal kontrak kerja, sistem outsourcing, dan mekanisme pemutusan hubungan kerja. Meskipun perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar, ada kekhawatiran bahwa ini bisa mengarah pada pengurangan perlindungan bagi pekerja, terutama dalam hal jaminan sosial dan upah minimum.

Pemerintah berpendapat bahwa fleksibilitas ini diperlukan untuk mengakomodasi perubahan dalam pasar kerja global dan untuk menarik investasi. Namun, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak mengarah pada situasi di mana pekerja yang terlibat dalam sistem kontrak jangka pendek atau outsourcing kehilangan perlindungan sosial yang seharusnya mereka dapatkan. Perlindungan terhadap pekerja harus tetap menjadi prioritas utama, dan pemerintah harus memantau pelaksanaan undang-undang ini untuk mencegah penyalahgunaan terhadap pekerja. (Sutrisno and Poerana 2020)

Dampak Terhadap Kebijakan Lingkungan

Salah satu isu kritis lainnya yang diangkat oleh UU Cipta Kerja adalah dampaknya terhadap lingkungan. UU ini memperkenalkan perubahan dalam persyaratan izin lingkungan, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan untuk proyek-proyek yang dianggap memiliki dampak lingkungan rendah. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah investasi di sektor infrastruktur dan industri dengan menekan waktu dan biaya perizinan. Namun, di sisi lain, penghapusan beberapa persyaratan izin lingkungan yang ketat menimbulkan kekhawatiran akan penurunan kualitas perlindungan lingkungan di Indonesia.

Pemerintah beralasan bahwa perubahan ini diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi yang selama ini memperlambat proyek-proyek pembangunan dan investasi di Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa proyek-proyek yang dipercepat ini tidak mengabaikan aspek lingkungan. Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proyek-proyek yang berpotensi berdampak negatif terhadap lingkungan. Pengenalan prosedur peninjauan dampak lingkungan yang lebih ketat dan transparan dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan yang tidak diinginkan. (Perizinan 2021)

Tantangan Implementasi di Daerah

Salah satu masalah terbesar dalam implementasi UU Cipta Kerja adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun UU ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan investasi, ada kekhawatiran bahwa perbedaan pemahaman dan interpretasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Banyak peraturan daerah yang masih tidak selaras dengan ketentuan yang berlaku di tingkat pusat, yang dapat menghambat proses investasi dan menciptakan potensi kebingungan di kalangan pelaku usaha.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang UU Cipta Kerja di tingkat daerah. Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan memberikan bimbingan yang jelas tentang bagaimana aturan ini harus diterapkan di masing-masing daerah. Penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan agar kebijakan yang diterapkan tidak tumpang tindih dan dapat memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan izin investasi di seluruh Indonesia. Evaluasi dan Monitoring

UU Cipta Kerja memperkenalkan mekanisme evaluasi dan monitoring yang lebih terstruktur untuk memastikan bahwa tujuan undang-undang ini tercapai. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap dampak undang-undang ini terhadap investasi, lapangan kerja, dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Proses evaluasi ini juga harus melibatkan para pemangku kepentingan dari sektor bisnis, serikat pekerja, dan masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif.

Melalui evaluasi yang menyeluruh, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Penyesuaian terhadap kebijakan mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah baru yang muncul seiring berjalannya waktu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang ini tidak hanya berjalan lancar dalam jangka pendek tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia. (MKN 2021)

Implikasi bagi Stabilitas Politik dan Sosial

Terakhir, UU Cipta Kerja juga memiliki implikasi bagi stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Reformasi hukum investasi yang cepat dan radikal sering kali menimbulkan reaksi dari berbagai kelompok masyarakat, baik yang mendukung maupun menentang perubahan tersebut. Reaksi ini sering kali dipicu oleh ketidakpahaman atau kurangnya sosialisasi mengenai tujuan dari undang-undang tersebut.

Pemerintah perlu melakukan upaya lebih untuk menjelaskan dampak positif dan negatif dari UU Cipta Kerja kepada masyarakat luas. Sosialisasi yang efektif akan membantu

masyarakat memahami bahwa perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, bukan untuk merugikan kepentingan mereka. Dialog yang terbuka antara pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat dapat membantu meredakan ketegangan sosial yang mungkin muncul akibat perubahan besar dalam hukum investasi ini.

Dengan demikian, meskipun UU Cipta Kerja menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, peranannya dalam reformasi hukum investasi di Indonesia tidak dapat diabaikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat dan sektor usaha serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Presiden Republik Indonesia 2020)

Perubahan Struktur Regulasi untuk Investasi di Sektor Strategis

UU Cipta Kerja secara langsung berdampak pada sektor-sektor strategis seperti energi, pariwisata, manufaktur, dan pertanian. Melalui revisi peraturan, undang-undang ini memberikan kemudahan bagi investor untuk mendapatkan hak pengelolaan lahan, terutama di kawasan yang telah ditetapkan sebagai area pembangunan strategis nasional. Namun, tantangan tetap muncul dalam harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah, khususnya dalam implementasi teknis di tingkat lapangan.

Di sektor energi, UU Cipta Kerja mendorong pengembangan energi terbarukan melalui regulasi yang lebih sederhana dan insentif fiskal. Misalnya, penghapusan beberapa izin teknis yang berlebihan mempercepat proses pengembangan proyek energi surya dan angin, yang sebelumnya terkendala birokrasi yang panjang. Namun, risiko konflik lahan dan penurunan kontrol terhadap dampak lingkungan menjadi isu yang harus diantisipasi.

Dampak pada Sektor UMKM

UU Cipta Kerja juga berfokus pada pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dengan menyederhanakan proses legalitas usaha. Penghapusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi UMKM, misalnya, mempermudah pelaku usaha kecil untuk mendapatkan pengakuan formal dan akses terhadap pendanaan. Selain itu, peluncuran OSS-RBA (Online Single Submission - Risiko Berbasis Aktivitas) memungkinkan UMKM untuk mengajukan izin melalui platform digital tanpa harus melalui proses manual yang rumit.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi kendala dalam hal literasi digital para pelaku UMKM, terutama di daerah terpencil. Pemerintah perlu melibatkan komunitas lokal dan memberikan pelatihan agar UMKM dapat memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal.

Penguatan Peran Penanaman Modal Asing (PMA)

Salah satu aspek penting dari UU Cipta Kerja adalah peningkatan keterbukaan bagi investor asing melalui pelonggaran daftar negatif investasi. Sektor-sektor yang sebelumnya terbatas bagi penanaman modal asing kini dibuka dengan batasan tertentu, seperti jasa pendidikan, kesehatan, dan logistik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aliran investasi langsung (FDI) ke Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik karena dapat mengancam eksistensi pelaku usaha lokal, terutama di sektor jasa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa investasi asing tersebut membawa transfer teknologi dan keahlian yang bermanfaat bagi tenaga kerja Indonesia.

Tantangan dalam Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Salah satu kendala besar dalam implementasi UU Cipta Kerja adalah harmonisasi antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya di tingkat daerah. Otonomi daerah seringkali menghasilkan peraturan yang bertentangan dengan kebijakan pusat, menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor. Dalam konteks ini, UU Cipta Kerja mencoba menyelaraskan regulasi dengan memberikan peran lebih besar kepada pusat dalam perizinan strategis.

Namun, pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran akan sentralisasi yang dapat melemahkan kapasitas daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah melalui komunikasi yang intensif, pendampingan, dan pelatihan bagi pejabat daerah untuk memahami mekanisme UU Cipta Kerja.

Peningkatan Kepercayaan terhadap Sistem Hukum

Investasi tidak hanya memerlukan insentif ekonomi, tetapi juga keyakinan bahwa hukum di Indonesia dapat melindungi hak-hak investor. UU Cipta Kerja telah memperbaiki beberapa aspek perlindungan hukum, seperti pengaturan sengketa investasi melalui arbitrase internasional dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Hal ini meningkatkan kredibilitas sistem hukum Indonesia di mata investor asing.

Namun, tantangan tetap ada dalam penegakan hukum yang konsisten, terutama di daerah yang masih menghadapi masalah korupsi dan ketidakpastian birokrasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa reformasi hukum tidak hanya terjadi di atas kertas, tetapi juga dirasakan dalam praktik nyata.

Peran Teknologi dalam Perizinan dan Transparansi

Penerapan sistem OSS berbasis risiko telah menjadi salah satu inovasi besar dalam reformasi perizinan. Teknologi ini memungkinkan proses perizinan yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Selain itu, sistem ini juga mengurangi interaksi langsung antara pelaku usaha dan pejabat, yang sebelumnya menjadi sumber potensial korupsi.

Namun, tantangan muncul dari kesiapan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil. Pemerintah perlu memastikan akses internet yang merata dan meningkatkan kapasitas teknis bagi pengguna sistem OSS di daerah.

Evaluasi Dampak terhadap Investasi dan Lapangan Kerja

Sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, data menunjukkan peningkatan realisasi investasi di beberapa sektor, seperti manufaktur dan teknologi informasi. Namun, evaluasi jangka panjang diperlukan untuk memastikan bahwa investasi tersebut benar-benar berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Investasi yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan keseimbangan sosial dan lingkungan dapat memicu konflik sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan ini secara berkala.

4. KESIMPULAN

Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) No. 11 Tahun 2020 merupakan langkah strategis dalam reformasi hukum investasi di Indonesia. Melalui penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan berbasis risiko, dan pelonggaran daftar negatif investasi, UUCK berhasil menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investasi domestik maupun asing. Sistem OSS berbasis digital juga meningkatkan efisiensi dan transparansi, meski tantangan seperti disparitas teknologi dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah masih perlu diatasi. UUCK mendorong pertumbuhan sektor strategis, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, pelaksanaan kebijakan ini memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan perlindungan pelaku usaha lokal, konsistensi penegakan hukum, dan evaluasi dampak sosial. Secara keseluruhan, UUCK menjadi fondasi penting dalam menarik investasi, mendorong pembangunan ekonomi, dan meningkatkan daya saing Indonesia secara global.

5. DAFTAR PUSTAKA

Arief, Anggreany, and Rizki Ramadani. 2021. "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik*

- Islam* 6(2):106–20. doi: 10.35673/ajmpi.v6i2.1550.
- Asiva Noor Rachmayani. 2021. “Penjelasan UU Cipta Kerja: Kebijakan Pengaturan Perizinan Dan Investasi.” 6.
- Kusbandini, Ely, Fajar Ari Sudewo, Titi Kusrina, Suci Hartati, Imawan Sugiharto, and Mukhamad Khamim. 2023. “Implikasi Pembangunan Investasi Di Daerah Terkait Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja.” *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 2(2):74–86. doi: 10.32734/ljsp.v2i2.11374.
- MKN. 2021. “Penyederhanaan Perizinan Usaha Dalam UU Cipta Kerja: Analisis Dampak Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).” 105(3):129–33.
- Pardede, Marulak. 2023. “Dilema Reformasi Regulasi Hukum Investasi Dalam Sistem Hukum Sipil dalam Perspektif Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing Dan Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23(2):231. doi: 10.30641/dejure.2023.v23.231-244.
- Perizinan, Reformasi. 2021. “Tantangan, Target Dan Realisasi Investasi Indonesia.”
- Prasetyo, Angga Dwi, Abdul Rachmad Budiono, and Shinta Hadiyantina. 2022. “Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan Dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law.” *Media Iuris* 5(2):159–88. doi: 10.20473/mi.v5i2.36165.
- Presiden Republik Indonesia. 2020. “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Peraturan.Bpk.Go.Id* (052692):1–1187.
- Ras, Hernawati, and Joko Trio Suroso. 2020. “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di.” *Jurnal Ilmiah MEA* 4(1):392–408.
- Rohendi, Acep. 2023. “The Impact of the Cipta Kerja Law on Business Legal Rules.” *Selisik* 9(2):1–26.
- Sutrisno, Nandang, and Sigar Aji Poerana. 2020. “Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo.” *Undang: Jurnal Hukum* 3(2):237–66. doi: 10.22437/ujh.3.2.237-266.